

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Triwulan II (April - Juni 2025)

1. Perkembangan Inflasi dan Harga Kebutuhan Pokok

Berdasarkan pantauan harga dan data inflasi dari BPS serta hasil monitoring lapangan, inflasi Kabupaten TTS pada Triwulan II Tahun 2025 menunjukkan tren stabil cenderung meningkat moderat, dengan rincian sebagai berikut:

Bulan	Inflasi Bulanan (m-to-m)	Inflasi Tahunan (y-on-y)	Inflasi Tahun Kalender (ytd)
April	0,34%	3,10%	1,05%
Mei	0,26%	3,17%	1,31%
Juni	0,29%	3,21%	1,60%

Komoditas Penyumbang Inflasi Utama:

- Beras: Harga mengalami kenaikan akibat keterlambatan distribusi dan masa tunggu panen lokal.
- Cabai rawit: Harga tinggi karena musim tanam belum menghasilkan panen.
- Ikan segar dan daging ayam ras: Meningkatnya permintaan rumah tangga dan perayaan lokal.
- Rokok dan LPG: Kontributor sekunder terhadap inflasi.

2. Perkembangan Harga Barang dan Jasa Lainnya

1. Barang Kebutuhan Pokok Lainnya

- Minyak goreng dan gula pasir: Harga relatif stabil.
- Bawang merah dan putih: Harga fluktuatif ringan.

1. Barang dan Jasa Non-Pangan

- Transportasi dan BBM: Tidak terjadi lonjakan signifikan.
- Jasa pendidikan dan kesehatan: Stabil.

3. Risiko Inflasi ke Depan (Triwulan III dan Seterusnya)

- Keterbatasan Distribusi: Cuaca dan medan memperlambat arus barang.
- Gangguan Produksi Lokal: Gagal panen parsial di beberapa kelompok tani.

- Kenaikan Harga BBM dan Transportasi: Berpotensi meningkatkan biaya distribusi.
- Permintaan Meningkat: Perayaan dan libur sekolah memicu tekanan harga.

4. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

- Optimalisasi Operasi Pasar dan ketersediaan stok beras SPHP.
- Peningkatan monitoring dan pengawasan harga.
- Penguatan cadangan logistik pangan di desa.
- Sinergi antar-OPD dan TPID dalam mitigasi risiko inflasi.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Ketergantungan Pasokan dari Luar Daerah

- Sebagian besar komoditas pangan seperti **bawang merah, cabai, dan ikan segar** masih didatangkan dari luar TTS (misalnya dari Kabupaten Kupang atau Pulau Jawa).
- Hal ini menyebabkan **harga sangat sensitif terhadap biaya logistik dan ketersediaan stok di luar daerah.**

2. Distribusi Terhambat Cuaca dan Infrastruktur

- Distribusi barang terganggu karena kondisi jalan rusak di beberapa kecamatan terutama di **wilayah selatan dan pegunungan** (misal: Amanatun Timur, Amanuban Barat).
- Curah hujan tinggi di awal April turut memperparah kondisi jalan dan menyebabkan keterlambatan pasokan ke pasar.

3. Minimnya Cadangan Pangan Lokal

- Beberapa kelompok tani mengalami **gagal panen atau keterlambatan masa tanam**, sehingga produksi beras lokal dan hortikultura belum maksimal pada triwulan ini.
- Ketergantungan terhadap distribusi dari BULOG dan distributor swasta sangat tinggi.

4. Tidak Meratanya Penyaluran dan Pelabelan SPHP

- Ditemukan **peredaran beras SPHP ilegal atau tanpa label** yang berpotensi merusak sistem harga di pasar dan menciptakan ketidakpastian.
- Kurangnya pengawasan distribusi menyebabkan harga SPHP di atas HET di beberapa pasar kecamatan.

5. Keterlambatan Penyesuaian Program Intervensi Harga

- Beberapa kegiatan intervensi seperti **pasar murah atau operasi pasar** belum terjadwal secara rutin dan menyeluruh di semua kecamatan.
- Koordinasi antar-OPD kadang belum maksimal dalam eksekusi program ketahanan pangan.

6. Keterbatasan Data dan Pemantauan Harian

- Masih terdapat **keterlambatan dalam pelaporan harga** dari pasar kecamatan ke dinas teknis, sehingga analisis cepat untuk penanganan belum optimal.
- Tidak semua pasar memiliki petugas pemantau harga yang aktif dan terlatih.

7. Potensi Permintaan Musiman

- Menjelang **libur sekolah dan perayaan pesta panen lokal**, terjadi **lonjakan permintaan** komoditas tertentu, namun tidak diikuti dengan suplai yang cukup.
- Ini berkontribusi pada **kenaikan harga cabai rawit, ayam ras, dan beras lokal.**

Ketergantungan pada Subsidi dan Bantuan Pusat

- Ketergantungan terhadap bantuan pusat seperti SPHP dan cadangan beras pemerintah (CBP) belum diimbangi dengan penguatan kapasitas produksi dan distribusi lokal.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Harga Komoditas Pokok

- TPID Kabupaten TTS secara rutin melakukan **monitoring harga mingguan dan bulanan** pada pasar strategis: Pasar SoE, Pasar Niki-Niki, dan Pasar Oinlasi.
- Komoditas yang dimonitor meliputi: **beras, cabai rawit, bawang merah, minyak goreng, dan daging ayam ras**.
- Data dikompilasi oleh Dinas Perdagangan dan dilaporkan kepada TPID Provinsi.

2. Pelaksanaan Operasi Pasar Murah Bersubsidi

- Pemerintah Daerah bekerja sama dengan **Perum BULOG TTS** menyelenggarakan **operasi pasar murah** di kecamatan rawan gejolak harga: Amanuban Selatan, Mollo Barat, dan Kolbano.
- Komoditas yang dijual: **beras SPHP, minyak goreng, dan gula pasir**, dengan harga di bawah pasar.
- Respon masyarakat sangat baik, membantu menstabilkan harga dan menekan gejolak inflasi lokal.

3. Pengawasan Distribusi dan Pelabelan Beras SPHP

- TPID dan Satgas Pangan melakukan **inspeksi mendadak di pasar-pasar tradisional**, menemukan kasus penjualan **beras SPHP ilegal/tanpa label**.
- Tindak lanjut dilakukan berupa **edukasi ke pedagang, pengawasan distribusi dari agen BULOG**, dan penguatan regulasi penyaluran SPHP sesuai HET.

4. Koordinasi Lintas Perangkat Daerah dan Stakeholder

- TPID menggelar **rapat koordinasi lintas OPD** (Disperindag, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, BULOG, dan Camat).
- Tujuannya: menyamakan data, mempercepat intervensi, dan menyusun langkah mitigasi risiko lonjakan harga menjelang musim kemarau.

5. Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah

- Pemerintah daerah mengoptimalkan **stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)** melalui gudang pangan lokal dan BULOG.
- Penyaluran CPP diprioritaskan untuk masyarakat miskin dan daerah dengan lonjakan harga tinggi.

6. Edukasi dan Komunikasi Publik

- Dinas Kominfo bersama TPID menyampaikan **informasi harga dan distribusi pangan** melalui media lokal dan sosial media.
- Edukasi juga diberikan terkait **ciri-ciri beras SPHP resmi**, pentingnya belanja bijak, dan menjaga stabilitas harga.

7. Keterlibatan Aktif dalam Program Capacity Building TPID Provinsi

- Perwakilan TPID TTS mengikuti kegiatan **Capacity Building TPID se-Provinsi NTT**, dengan tema:
"Sinergi Memperkuat Ketahanan Pangan untuk Ekonomi NTT yang Tumbuh Kuat dan Berkelanjutan".
- Hasil pelatihan diimplementasikan dalam penyusunan roadmap pengendalian inflasi lokal.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Efektivitas Monitoring Harga dan Pasar

2. Capaian:

- Monitoring mingguan yang dilakukan oleh TPID dan Dinas Perdagangan telah berjalan rutin di pasar-pasar strategis.
- Laporan harga berhasil mendeteksi tren awal kenaikan harga cabai rawit dan beras.

1. Kendala:

- Belum semua kecamatan memiliki petugas pemantau aktif.
- Pengumpulan data dari pasar kecamatan kadang terlambat atau tidak lengkap.

2. Intervensi Operasi Pasar Murah

3. Capaian:

- Operasi pasar murah sukses digelar di lebih dari 5 kecamatan, bekerja sama dengan BULOG dan distributor lokal.
- Harga beras SPHP dan minyak goreng berhasil ditekan di bawah harga pasar.

1. Kendala:

- Kegiatan belum menjangkau seluruh wilayah terpencil.
- Keterbatasan stok dan distribusi logistik menyebabkan keterlambatan pelaksanaan di beberapa titik.

3. Penanganan Beras SPHP Ilegal

4. Capaian:

- TPID menemukan dan menindak pedagang yang menjual SPHP tanpa label resmi.
- Sosialisasi dan penertiban dilakukan secara langsung di Pasar SoE dan Niki-Niki.

1. Kendala:

- Masih terdapat celah distribusi yang tidak terawasi dari agen ke pedagang eceran.
- Belum ada sistem sanksi yang tegas secara hukum terhadap pelanggaran.

4. Koordinasi Lintas OPD dan Stakeholder

5. Capaian:

- Forum koordinasi TPID digelar 2 kali selama triwulan ini, menghasilkan peta masalah dan solusi lintas sektor.
- Komunikasi dengan BULOG dan Perumda mulai intensif untuk penyediaan stok lokal.

1. Kendala:

- Implementasi dari keputusan forum masih lambat karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.
- Beberapa OPD masih berjalan sendiri-sendiri dalam program ketahanan pangan.

5. Cadangan Pangan dan Stabilisasi Pasokan

6. Capaian:

- Cadangan pangan dari gudang pemerintah berhasil disalurkan di wilayah rawan pangan.
- Beras SPHP mampu menjaga kestabilan harga di beberapa pasar utama.

1. Kendala:

- Tidak semua kecamatan memiliki gudang penyimpanan cadangan.
- Masih ada ketergantungan tinggi terhadap pengiriman dari luar daerah.

6. Program Edukasi dan Komunikasi Publik

7. Capaian:

- Masyarakat mulai mengenal SPHP resmi berkat kampanye Kominfo dan TPID melalui radio lokal dan media sosial.
- Edukasi belanja bijak mulai digalakkan di sekolah dan desa.

1. Kendala:

- Jangkauan informasi belum maksimal di wilayah pedalaman.
- Literasi keuangan dan konsumsi masyarakat masih terbatas.

7. Partisipasi dalam Capacity Building TPID

8. Capaian:

Kabupaten TTS aktif dalam pelatihan TPID tingkat provinsi, membawa pulang strategi baru terkait distribusi dan stok pangan.

1. **Kendala:**

- Belum semua rekomendasi pelatihan dapat langsung diimplementasikan karena perlu anggaran tambahan dan perubahan regulasi lokal.

8. **Kesimpulan Evaluasi**

Kebijakan pengendalian inflasi yang diterapkan di Triwulan II cukup efektif dalam **meredam gejala harga pangan pokok** di tengah tantangan geografis dan distribusi. Namun, untuk hasil yang lebih optimal, **penguatan kelembagaan, logistik, dan literasi masyarakat** perlu ditingkatkan pada triwulan berikutnya.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. **Penguatan Sistem Distribusi Pangan Lokal**

□ Mendorong Dinas PU bersama Dinas Perdagangan dan Ketahanan Pangan untuk:

- Mempercepat perbaikan akses jalan ke sentra produksi pangan di kecamatan pegunungan dan terpencil.
- Menginisiasi pembentukan **Lumbung Pangan Desa** atau gudang cadangan bahan pokok di wilayah rawan inflasi.

2. **Penjadwalan Operasi Pasar Secara Berkala**

□ Menetapkan jadwal **operasi pasar murah secara berkala** (minimal 1 kali per bulan di tiap zona).

- Menyasar kecamatan dengan **potensi gejala harga tertinggi** seperti Amanatun Timur, Kuantana, dan Amanuban Selatan.
- Menyediakan **beragam komoditas pokok (beras, minyak, gula, telur, bawang)** agar dampaknya lebih luas.

3. **Digitalisasi dan Optimalisasi Data Harga**

□ Mempercepat penggunaan **aplikasi pencatatan harga harian** oleh petugas pasar.

- TPID bekerja sama dengan Dinas Kominfo dan BPS untuk menyediakan dashboard harga mingguan yang bisa diakses publik dan pemangku kepentingan.
- Meningkatkan akurasi dan kecepatan respon terhadap fluktuasi harga.

4. **Pengetatan Pengawasan Distribusi SPHP**

□ Dinas Perdagangan dan Satgas Pangan perlu memperkuat:

- Pengawasan terhadap agen/pedagang penerima SPHP untuk memastikan **tidak terjadi penjualan di atas HET** dan berlabel resmi.
- Penyusunan SOP dan sanksi administratif terhadap pelanggaran distribusi SPHP di pasar.

5. **Peningkatan Kapasitas Produksi Pangan Lokal**

□ Bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan:

-

Mendorong percepatan musim tanam hortikultura di daerah penghasil (Mollo Utara, Noebeba).

- Memfasilitasi **bantuan bibit, pupuk dan alat pertanian** untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan luar daerah.

6. **Edukasi Konsumen dan Literasi Harga**

□ Melalui Dinas Kominfo dan TPID:

- Meningkatkan kampanye “**Belanja Bijak dan Cermat**” melalui media lokal dan kegiatan penyuluhan.
- Mengedukasi masyarakat tentang **perbedaan produk bersubsidi dan nonsubsidi**, serta pentingnya belanja sesuai kebutuhan.

7. **Penguatan Koordinasi dan Dana TPID**

□ Perlu dukungan dari Pemkab melalui:

- Penyediaan **anggaran khusus operasional TPID** agar pelaksanaan kegiatan dan pengawasan berjalan optimal.
- Mendorong **pertemuan lintas OPD secara rutin** untuk memastikan program ketahanan pangan dan stabilisasi harga berjalan terkoordinasi.

8. **Kolaborasi dengan Pihak Ketiga (BUMN, Perbankan, Swasta)**

□ Melibatkan Pegadaian, Bank NTT, dan Perumda dalam:

- Program distribusi beras murah, pinjaman produktif bagi petani, dan subsidi transportasi komoditas dari desa ke pasar.

Kesimpulan

Dengan memperkuat sinergi lintas sektor dan menerapkan kebijakan yang berbasis data serta responsif terhadap kebutuhan wilayah, Kabupaten TTS dapat menjaga **stabilitas harga dan daya beli masyarakat**, terutama dalam menghadapi tantangan distribusi dan musim tanam.